

ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Cirebon Nomor 002/Bpsk/Ii/2015 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen yang berkaitan dengan Sewa Guna Usaha (Leasing) antara penerima sewa sebagai konsumen dengan pemberi sewa sebagai pelaku usaha dalam putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cirebon Nomor 002/BPSK/II/2015. Pada awalnya konsumen telah melakukan perjanjian mengenai kesepakatan kontrak dengan pelaku usaha. dalam pembayaran kredit tersebut konsumen mengalami kepailitan akan tetapi pihak pelaku usaha secara sepihak mengambil mobil tanpa adanya rekomendasi terlebih dahulu. Dengan pengambilan mobil secara sepihak konsumen merasa haknya dilanggar.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Cirebon.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon dalam Putusan Nomor 002/BPSK/II/2015 adalah melalui cara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, 4, dan 5 angka 2 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Konsumen, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Consumer dispute resolution relating to the Lease (Leasing) between the receiver as a consumer lease by the lessor as businesses in the verdict of the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) Cirebon No. 002 / BPSK / II / 2015. In consumers have made an agreement regarding the contract with entrepreneurs. in the loan payment of insolvent consumers but the businesses unilaterally took the car without their prior recommendations. With a car-making unilateral consumers feel that their rights are violated.

The method used in this research is normative juridical approach, namely studies on law conceived and developed on the basis of the doctrine, while the analytical methods used are qualitative normative. This research was conducted in Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) Cirebon.

Dispute resolution conducted by the Consumer Dispute Settlement Board Cirebon in Decision No. 002 / BPSK / II / 2015 is by way of mediation as provided for in Article 3, 4, and 5 number 2 Decree of the Minister of Industry and Trade No. 350 / MPP / Kep / 12/2001 on the Implementation of Duties and Powers of Consumer Dispute Settlement Body of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Dispute Resolution, Consumer, Consumer Protection*